

**SANKSI HUKUM TERHADAP MALADMINISTRASI DALAM
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
DILAKUKAN OLEH PENYIDIK KEJAKSAAN**

TESIS

Oleh:

**WENI KUSWARDANI
201520251004**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
JAKARTA
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : **Sanksi Hukum Terhadap Maladministrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Penyidik Kejaksaan.**

Nama Mahasiswa : Weni Kuswardani

Nomor Pokok Mahasiswa : 201520251004

Program Studi/Program : Magister Hukum/Pascasarjana

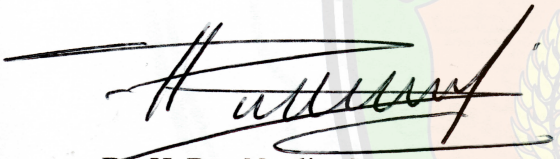
Konsentrasi : Hukum Pidana

Jakarta, 6 Februari 2018

MENYETUJUI:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Boy Nurdin, SH., MH
NIDN: 0311026802



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH
NIDN: 0319046403

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : **Sanksi Hukum Terhadap Maladministrasi
Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang
Dilakukan Oleh Penyidik Kejaksaan.**

Nama Mahasiswa : Weni Kuswardani

Nomor Pokok Mahasiswa : 201520251004

Program Studi/Fakultas : Magister Hukum/Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 6 Februari 2018

Jakarta, 6 Februari 2018

Mengesahkan,

Ketua Tim Penguji : Dr. H. Boy Nurdin, SH., MH

NIDN : 0311026802

Penguji I : Dr. Ir. H.M. Hanafi Darwis, SH., MM

NIDN : 0323015604

Penguji II : Prof. I Made Widnyana, SH., MH

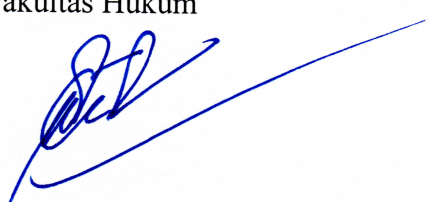
NIDN : -

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Magister Hukum

Dekan
Fakultas Hukum


Dr. Dwi Atmoko, SH., MH
NIP: 1801313


Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.IK., MM., MH
NIP: 1401175

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Tesis Yang Berjudul

Sanksi Hukum Terhadap Maladministrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Penyidik Kejaksaan

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 6 Februari 2018

Yang Membuat Pernyataan,

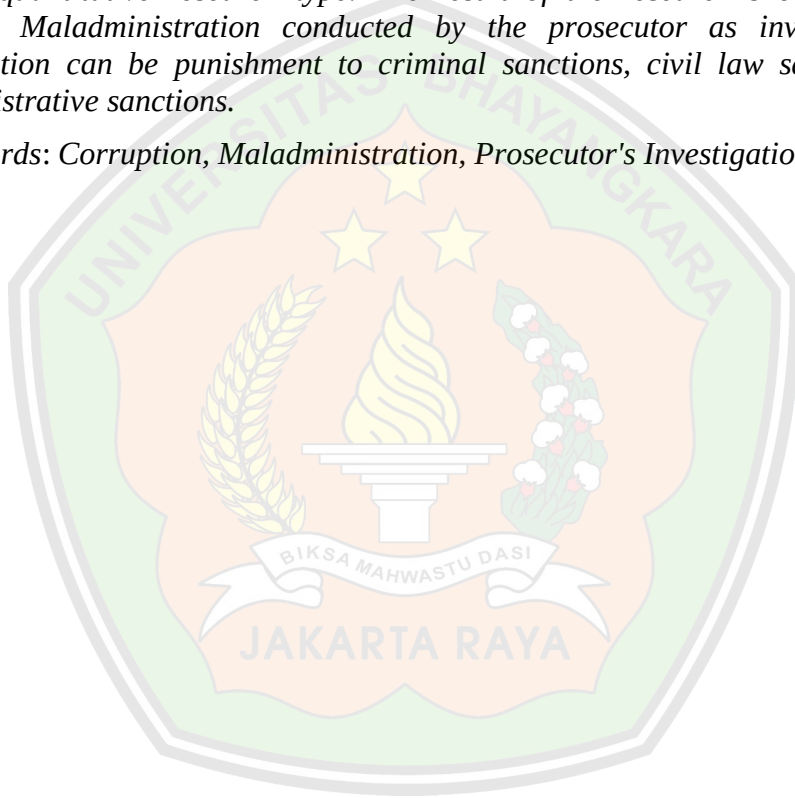


Weni Kuswardani
201520251004

ABSTRACT

The performance of law enforcement becomes a crucial problem for Indonesia. The Attorney as one of the law enforcement agencies is required to play a greater role in upholding the supremacy of the law; public interest accounts; enforcement of human rights; as well as the prevention, prosecution and eradication of criminal acts of corruption, but the prosecutor's investigator who should form the law as commander, the standard of treatment with maladministration. This study aims to determine and analyze 1) factors causing maladministration can occur in the process of investigation of corruption by the prosecutor; and 2) sanctions that can be imposed on maladministration conducted by the prosecutor as investigators of corruption. This research uses normative juridical approach by using quantitative research type. The result of the research shows the cause factor. Maladministration conducted by the prosecutor as investigators of corruption can be punishment to criminal sanctions, civil law sanctions, and administrative sanctions.

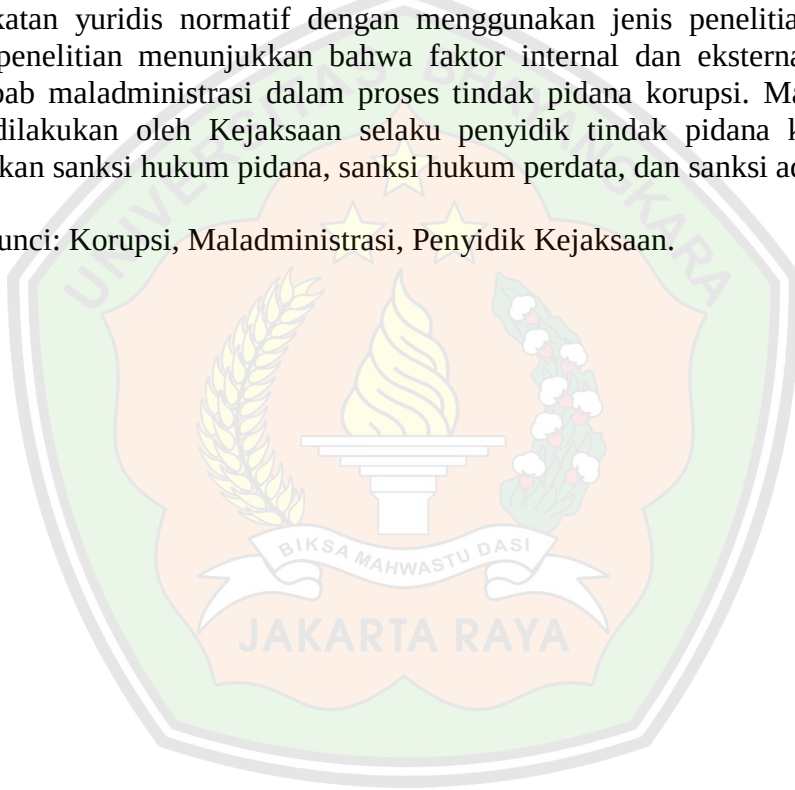
Keywords: *Corruption, Maladministration, Prosecutor's Investigations.*



ABSTRAK

Kinerja penegak hukum menjadi masalah krusial yang dihadapi Indonesia. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum; perlindungan kepentingan umum; penegakan hak asasi manusia; serta pencegahan, penindakan, dan pemberantasan tindak pidana korupsi, namun penyidik Jaksa yang semestinya berperan menjadikan hukum sebagai panglima, justru mengabaikan standar administrasi dengan melakukan tindakan maladministrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis 1) faktor-faktor penyebab maladministrasi dapat terjadi dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan; dan 2) sanksi yang dapat dikenakan terhadap maladministrasi yang dilakukan oleh Kejaksaan selaku penyidik tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal dan eksternal merupakan penyebab maladministrasi dalam proses tindak pidana korupsi. Maladministrasi yang dilakukan oleh Kejaksaan selaku penyidik tindak pidana korupsi dapat dikenakan sanksi hukum pidana, sanksi hukum perdata, dan sanksi administratif.

Kata kunci: Korupsi, Maladministrasi, Penyidik Kejaksaan.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, karena berkat rahmat dan ridho-Nya tesis ini dapat disusun dan diselesaikan. Selama menempuh pendidikan dan penulisan serta penyelesaian tesis ini penulis banyak memperoleh dukungan baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati, penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Prof. I Made Widnyana, SH., MH., selaku Kepala Program Bidang Studi Magister pada Universitas Bhayangkara Jakarta Jaya;
2. Dr. H. Boy Nurdin, SH., MH. dan Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH., selaku Pembimbing;
3. Warto, SH., MH., selaku Kepala Biro Perlengkapan pada Jaksa Agung Muda Pembinaan;
4. Dosen Pengajar dan staf Sekretariat Magister Hukum pada Universitas Bhayangkara Jakarta Jaya
5. Keluarga dan Hendri Siswanto, SH., MH. yang telah memberi semangat kepada penulis;

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan anugrah-Nya bagi beliau-beliau yang tersebut di atas. Sangat disadari dalam tesis ini terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu semua saran dan kritik penulis terima dengan lapang dada demi kesempurnaan penulisan tesis ini. Akhirnya harapan penulis semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua.

Bekasi, Januari 2018

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR GRAFIK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Peneltian	6
1.3.2 Manfaat Penelitian	7
1.4 Kerangka Teoritis dan Kerangka Pemikiran	7
1.4.1 Kerangka Teoritis	7
1.4.2 Kerangka Pemikiran	15
1.5 Metode Penelitian	18
1.6 Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
2.1 Gambaran Umum Tindak Pidana Korupsi	26
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi	26
2.1.2 Sekilas Tentang Sejarah Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia ...	32
2.1.3 Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi	35
2.2 Gambaran Umum Kejaksaan Republik Indonesia	38
2.2.1 Sekilas Tentang Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia	38
2.2.2 Etika dan Moral Kejaksaan	41

2.2.3	Kode Perilaku Jaksa	46
2.2.4	Fungsi, Tugas, dan Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia	49
2.2.5	Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum.....	52
BAB III	FAKTOR PENYEBAB MALADMINISTRASI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI	57
3.1	Konsep Maladministrasi	57
3.2	Penyalahgunaan Wewenang Kejaksaan dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	67
3.2.1	Jaksa Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi	67
3.2.2	Penyalahgunaan Wewenang Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi	72
3.3	Faktor Penyebab Maladministrasi dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	75
3.4	Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia	85
BAB IV	SANKSI TERHADAP PENYIDIK KEJAKSAAN YANG MELAKUKAN MALADMINISTRASI	93
4.1	Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi	93
4.2	Penyelesaian Maladministrasi Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	95
4.3	Penyelesaian Maladministrasi Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara	97
4.4	Penyelesaian Maladministrasi Oleh Ombudsman	103
4.4.1	Penyelesaian Maladministrasi Yang Dilaporkan Oleh Masyarakat Atau Sekelompok Masyarakat	103
4.4.2	Penyelesaian Maladministrasi Atas Inisiatif Sendiri	112
4.5	Sanksi Hukum Terhadap Penyidik Kejaksaan Yang Melakukan Tindakan Maladministrasi	114
BAB V	PENUTUP.....	124
5.1	Kesimpulan	124
5.2	Saran	126
DAFTAR PUSTAKA		128
RIWAYAT HIDUP		139

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran	17
Gambar 2.1 <i>The Fraud Triangle</i>	28
Gambar 2.2 Hierarki Kebutuhan Maslow	30
Gambar 2.3 Struktur Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia	41
Gambar 4.1 Proses Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara	102
Gambar 4.2 Alur Penyelesaian Laporan	114



DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 2.1 Penilaian Masyarakat Terhadap Kinerja Lembaga Penegak Hukum	54
Grafik 2.2 Survei Poltracking Indonesia Kepercayaan Publik Terhadap Kinerja Penegak Hukum	55
Grafik 3.1 Substansi Laporan Maladministrasi	82

